



Implementasi Program 1 Kartu Keluarga 1 Sarjana di Kota Surabaya

Febrialta Dinda Safira¹, Hana Rizky Ardini², Alfina Audry Anggraeni³, Najla Syifa Maharani⁴, Oktarizka Reviandani⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: 22041010206@student.upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 02, 2025

Accepted June 11, 2025

Available online June 14, 2025

Kata Kunci:

Implementasi; Program; Pendidikan; Kemiskinan

Keywords:

Implementation; Program; Education; Poverty



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Pendidikan berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, ketimpangan sosial-ekonomi menyebabkan akses pendidikan yang tidak merata, terutama bagi keluarga miskin. Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan Program 1 Kartu Keluarga 1 Sarjana untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti Asrama Bibit Unggul. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta peran pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan

tinggi, dan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Surabaya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ini.

ABSTRACT

Education plays an important role in breaking the cycle of poverty and improving people's quality of life. However, socio-economic disparities cause unequal access to education, especially for poor families. The Surabaya City Government implemented the 1 Family Card 1 Bachelor Program to expand access to higher education for underprivileged families, through cooperation with universities and the private sector, as well as providing supporting facilities such as the Superior Seed Dormitory. This study aims to analyze the effectiveness of the program in improving the skills and competitiveness of the workforce, as well as the role of the government and the private sector in supporting the sustainability of the program. The method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews, and documentation at UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. The results showed that effective communication, adequate resources, and commitment from the implementers are key factors in the successful implementation of the program. Collaboration between the government, universities, and the private sector through Corporate Social Responsibility (CSR) also contributed significantly to reducing unemployment and poverty in Surabaya. This research provides recommendations to optimize education policy and improve community welfare through this program.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta mendukung kemajuan suatu negara melalui inovasi dan pengembangan teknologi (Fau, Mendrofa, Wau, & Waruru, 2023).

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak (Fabela & Khairunnisa, 2024). Ketidakmerataan distribusi sumber daya mengakibatkan hanya sebagian kecil kelompok yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak, sehingga banyak individu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal tersebut memperparah siklus kemiskinan antar generasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Program 1 Kartu Keluarga 1 Sarjana bertujuan dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin. Program ini memberikan kesempatan bagi satu anggota keluarga untuk menempuh pendidikan sarjana atau vokasi melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan sektor swasta (Aprilyantini, 2019). Selain menyediakan beasiswa, program ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Asrama Bibit Unggul, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta program. Keterlibatan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Perusahaan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi lulusan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengurangi pengangguran di Surabaya. (Aprilyantini, 2019).

Meskipun program ini memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan pendidikan masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas peran pemerintah dalam implementasi 1 KK 1 Sarjana di kota besar seperti Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji aspek kebijakan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan tingkat pengangguran di Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa program pelaksanaan 1 KK 1 Sarjana, sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti peran pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program melalui kolaborasi dengan universitas dan partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini juga akan menilai kemampuan program dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan generasi muda. Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada dalam pelaksanaan program, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik berfokus pada masyarakat dan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Kebijakan publik membahas proses perumusan dan pendefinisian isu-isu publik, serta bagaimana isu-isu tersebut dimasukkan ke dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah disusun sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tersebut muncul akibat adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Meskipun terdapat kesamaan dan perbedaan dalam berbagai definisi, namun kesemuanya menunjukkan hubungan yang sangat erat antara politik dan administrasi negara, meniadakan dikotomi politik-administrasi yang tercermin pada hubungan kausalitas antara kebijakan publik dan kepentingan publik (Yaw, 2008).

Kebijakan Publik menurut Dye (dalam Yaw, 2008) apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, Dye menyatakan bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk bertindak, tindakan tersebut harus memiliki tujuan (objektif) yang jelas. Kebijakan publik mencakup seluruh tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar pernyataan niat atau keinginan dari pemerintah atau para pejabatnya (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Program

Menurut Arikunto dan Jabar (Munthe, 2015) istilah "program" memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti umum dan khusus. Secara umum, program merujuk pada rencana yang akan dilaksanakan. Program dapat didefinisikan sebagai komponen penting untuk mencapai tujuan tertentu yang berisirencana atau rancangan yang dibuat kemudian dijalankandalam berbagai aspek seperti ketatanegaraan, perekonomian, dan acara tertentu. Dengan demikian, program dapat dilihat sebagai bentuk rencana dan tindakan yang sudah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Kolaborasi

Kolaborasi adalah proses strategis dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Menurut Gray (1989), kolaborasi membantu menjembatani perbedaan dan mencari solusi berbasis konsensus. Camarihna-Matos & Afsarmanesh (2008) menekankan pentingnya berbagi informasi, tanggung jawab, dan sumber daya demi efisiensi dan kualitas hasil. Ansell & Gash (2007) memperkenalkan *collaborative governance*, yang memfokuskan pada pengambilan keputusan kolektif berbasis konsensus antara lembaga publik dan swasta. Secara keseluruhan, kolaborasi mendorong komunikasi terbuka, inovasi, dan solusi inklusif dalam menghadapi isu lintas sektor.

2. METODE

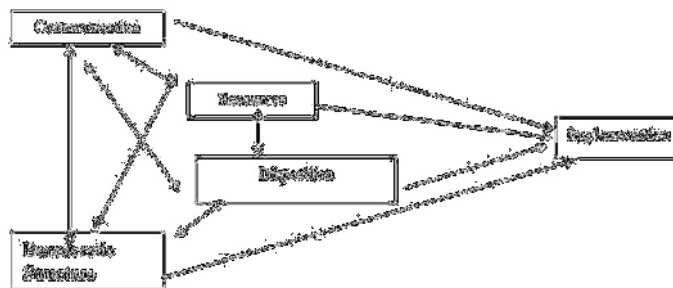
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam

dalam konteks yang alami, tanpa adanya intervensi eksperimental. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan observasi, analisis, serta interpretasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis, objektif, dan akurat mengenai fenomena yang dikaji. Lokasi penelitian ini adalah UPTD Kampung Anak Negeri. UPTD Kampung Anak Negeri ini beralamat di Jl. Villa Kalijudan Indah XV Kav.2 - 4 Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah pengawas dari UPTD Kampung Anak Negeri, yaitu Veronika Yocelinanda Februanti. S.KM. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh Edy Sutrisno, 2007 dengan unsur pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan observasi, analisis, serta interpretasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Dilakukannya pengamatan dan analisis secara menyeluruh digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam terhadap objek penelitian, yaitu penerima bantuan 1 KK 1 Sarjana di Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tanpa metode kualitatif yang sesuai, penelitian bisa kehilangan konteks dan nuansa penting, sehingga sulit mencapai tujuan. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan langkah-langkah penelitian konsisten dengan prinsip kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam melakukan penelitian, mencakup cara-cara yang sistematis untuk memperoleh data, menganalisis data, dan memberikan kesimpulan yang valid.

Menurut Sugiyono (2015:15), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan berbagai metode). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi.

Gambar 1. Keterkaitan Konsep-konsep Implementasi .



Sumber: F. Indrapratiyanti, Jurnal Pedagogia, Volume III, 2020 : 149

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data sesuai indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi. Untuk memberi makna terhadap hasil penelitian tersebut dilakukan penjelasan dan pembahasan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks program *1 Kartu Keluarga 1 Sarjana* di Surabaya, komunikasi berperan penting untuk memastikan masyarakat miskin memahami manfaat dan prosedur program. Kejelasan informasi, seperti syarat peserta, proses seleksi, bentuk beasiswa, dan sistem pendampingan, harus disampaikan secara rinci agar tidak menimbulkan miskomunikasi. Karena program ini melibatkan banyak pihak pemerintah, asrama, perguruan tinggi, dan mitra perusahaan konsistensi informasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menghindari kesenjangan pemahaman dan menjaga kepercayaan publik. Selain itu, komunikasi juga harus akurat dan mudah diakses, misalnya melalui penyuluhan di tingkat kelurahan atau kerja sama dengan RT/RW. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, dapat terjadi asimetri informasi yang membuat sebagian masyarakat tertinggal dalam akses terhadap program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pada program ini dilakukan secara efektif dan terstruktur, karena pihak dinas memberikan informasi dengan jelas melalui berbagai media sosial untuk menjangkau warga. Informasi yang disampaikan mencakup persyaratan program, prosedur pendaftaran, tahapan seleksi, serta hak dan kewajiban peserta. Kejelasan informasi ini membantu masyarakat memahami program secara menyeluruh dan meningkatkan minat untuk berpartisipasi. Selain itu, adanya koordinasi rutin antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, pihak asrama, dan perguruan tinggi mitra juga memperkuat konsistensi pesan yang disampaikan.

2. Sumber daya

Menurut Edward III, implementasi tidak akan efektif tanpa adanya sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya adalah kunci dari keefektifitasan dari implementasi. Sumber-sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Program 1 KK 1 Sarjana ini dibuat untuk penyelarasan badan standardisasi pendidikan dengan akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022. Pada Program 1 KK 1 Sarjana di Kota Surabaya ini dikelola dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Program 1KK 1 Sarjana ini diinformasikan melalui *door to door* ke rumah-rumah warga keluarga miskin yang ada di Kota Surabaya, sehingga keluarga tersebut mengetahui langsung dari pihak resmi. Dinas Soaial Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu Yayasan Bakti Persatuan dalam membiaya seluruh kebutuhan termasuk biaya pendidikan yang diterima oleh penerima

bantuan dari 1 KK 1 Sarjana. Pada aspek sarana dan prasarana dari Dinas Sosial Kota Surabaya telah menyediakan asrama khusus dan dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang diperuntukkan oleh penerima bantuan 1 KK 1 Sarjana yang bernama Asrama Bibit Unggul yang terletak di Jl. Villa Kalijudan Indah XV/Kav. 2-4 Surabaya. Untuk kuota penerima beasiswa hanya berlaku untuk 200 orang. Beasiswa ini bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Surabaya, seperti Universitas 17 Agustus, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Hayam Wuruk, Universitas Surabaya, Universitas Air Langga, Poli Teknik Kesehatan dll dengan program studi keperawatan, kebidanan, teknik, informatika, elektro, administrasi publik. Program ini juga bekerja sama dengan Yayasan Bakti Persatuan dalam memberikan peluang kerja setelah lulus dari perkuliahan, sehingga nanti dapat langsung bekerja dan disalurkan ke perusahaan mereka.

3. Disposisi

Menurut teori Edward III, agar suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik, para pelaksana harus mampu memahami dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika pandangan atau sikap pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi bisa menjadi rumit dan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam konteks ini, Edward III menekankan bahwa disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup seberapa besar komitmen, konsistensi, dan integritas yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta sejauh mana proses pelaksanaan dilakukan secara demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, khususnya aparat kelurahan di Kota Surabaya, menunjukkan kecenderungan yang positif dalam mendukung pelaksanaan Program 1 KK 1 Sarjana. Hal ini terlihat dari adanya komitmen dan kesediaan yang tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk kesiapan memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi warga, serta mendampingi proses administrasi program. Para pelaksana juga menunjukkan sikap proaktif dan responsif terhadap kendala yang dihadapi masyarakat, yang mencerminkan adanya rasa tanggung jawab serta keselarasan antara nilai-nilai pribadi pelaksana dan tujuan program. Disposisi yang baik ini menjadi faktor penting dalam memastikan program dapat berjalan secara optimal di tingkat kelurahan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut pandangan Edward III, struktur birokrasi yang efektif harus ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan sistematis serta pembagian tugas yang terorganisir dengan baik. Hal ini penting agar para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya secara tertib, terarah, dan terkoordinasi dengan baik. Edward III juga menekankan pentingnya manipulasi insentif sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pelaksana dalam menjalankan kebijakan publik, serta perlunya struktur birokrasi yang kondusif untuk mengelola kerjasama antar pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program 1 KK 1 Sarjana di Surabaya menunjukkan bahwa penerapan SOP telah menjadi pedoman utama yang memberikan arahan konsisten bagi seluruh pihak yang terlibat. Fragmentasi struktur birokrasi yang relatif rendah memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan lancar tanpa tumpang tindih, sehingga mendukung koordinasi yang efisien dan efektif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum optimal. Selain itu, pemberian insentif yang kurang memadai menjadi faktor penghambat utama yang berpotensi menurunkan motivasi kerja pelaksana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, diperlukan penyederhanaan struktur birokrasi agar lebih responsif dan fleksibel serta peningkatan pemberian insentif sebagai motivator bagi pelaksana agar mereka dapat bekerja dengan lebih maksimal dan berkomitmen tinggi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program 1 Kartu Keluarga 1 Sarjana yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang progresif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program ini telah berjalan cukup efektif jika ditinjau dari empat indikator menurut teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah di deskripsikan dan dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi komunikasi, program ini berhasil menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan konsisten melalui berbagai media serta kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat miskin yang sebelumnya kurang mendapatkan akses informasi mengenai pendidikan tinggi.
2. Dari aspek sumber daya, dukungan dari Dinas Sosial, universitas mitra, dan pihak swasta melalui CSR memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk pendanaan pendidikan, penyediaan asrama, hingga peluang kerja setelah lulus. Namun, keterbatasan kuota dan infrastruktur masih menjadi tantangan yang perlu dievaluasi untuk perluasan cakupan program.
3. Pada aspek disposisi, terlihat adanya komitmen yang tinggi dari aparat pelaksana kebijakan di lapangan, termasuk kesiapan mereka dalam memberikan pendampingan serta respons terhadap permasalahan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat. Sikap proaktif ini memperkuat keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program.
4. Sementara dari sisi struktur birokrasi, penerapan SOP yang jelas dan koordinasi antar instansi berjalan baik, namun masih terdapat kendala teknis seperti kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah mendukung pelaksanaan program, namun tetap memerlukan perbaikan di beberapa aspek teknis dan operasional.

Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, berikut direkomendasikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu terus meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai Program 1 KK 1 Sarjana, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara masif melalui berbagai saluran seperti media sosial, penyuluhan di tingkat RT/RW, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Hal ini penting agar tidak ada warga miskin yang tertinggal dalam memperoleh informasi dan akses terhadap program.
2. Dinas Sosial dan instansi terkait perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada staf pelaksana program sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada peserta lebih optimal. Selain itu, perlu penambahan fasilitas pendukung seperti ruang belajar dan teknologi digital di Asrama Bibit Unggul agar peserta bisa belajar secara maksimal.
3. Pemerintah perlu memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR). Selain dukungan finansial, perusahaan dapat dilibatkan dalam penyediaan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan penyediaan lowongan kerja yang relevan bagi lulusan program. Kolaborasi ini akan memperkuat daya serap tenaga kerja lulusan program di pasar kerja.
4. Diperlukan mekanisme evaluasi dan monitoring yang terstruktur, baik dari sisi internal (oleh Dinas Sosial) maupun eksternal (melalui tim independen). Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan implementasi program, serta menyesuaikan strategi pelaksanaan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan kuota penerima manfaat agar lebih banyak keluarga miskin yang terbantu. Selain itu, program harus lebih inklusif terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak yatim yang memiliki potensi akademik namun terbatas secara ekonomi.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, perlu adanya pengembangan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk pelatihan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Dengan demikian, lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap secara mental dan sosial menghadapi dunia kerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *EVALUASI PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL REJOMULYO DI KOTA SEMARANG*. 6.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158-3161.
- Fau, J., Mendrofa, K. J., Wau, M., & Waruwu, Y. (2023). Pendidikan Jendela Dunia. *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 69-77.

- Fitri, S. M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward, dan punishment terhadap anggaran berbasis kinerja (Studi empirik pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 157–171.
- Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1.
- Nugroho, D., & Kurniawan, B. (2021). Kolaborasi dalam tata kelola kebijakan publik: Tinjauan teori dan praktik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Sari, D. M., & Prasetyo, R. B. (2023). Peran kolaborasi dalam manajemen program sosial di era digital. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Sosial*.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Suherman, (2022). Kolaborasi sebagai pendekatan strategis dalam penyelesaian masalah sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Tarigan, N. P., Sari, E. N., & Astuty, W. (2024). Pengaruh pelaksanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial melalui penyerapan anggaran. *Jurnal Humaniora*, 8(1), 193–219.
- Ummah, M. S. (2019). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.